

## DUKUNGAN RUSIA TERHADAP MYANMAR DALAM KONFLIK TAHUN 2021–2022

Septian Derrys Arvianto<sup>1</sup>

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### ABSTRACT

This study examines Russia's national interests in supplying major weapon systems (alutsista) to Myanmar amid the dynamics of international relations following the 2021-2022 military coup. Utilizing an international relation analytical approach, the research highlights how Russia leverages Myanmar's internal crisis as a strategic opportunity to expand its influence and national interests in Southeast Asia. Russia's involvement affects not only military aspects but also impedes democratization and reinforces oligarchic structures in Myanmar. The close bilateral relationship reflects mutual support in international forums and opens new opportunities for Russia in the energy and nuclear technology sectors.

**Keywords:** Russia, Myanmar, arms supply, international relations, coup.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas kepentingan nasional Rusia dalam pemasokan alat utama sistem senjata (alutsista) ke Myanmar di tengah dinamika hubungan internasional pasca kudeta militer 2021–2022. Rusia memanfaatkan krisis internal Myanmar sebagai peluang strategis untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Dukungan tersebut diwujudkan melalui suplai alutsista dan dukungan diplomatik kepada Dewan Administrasi Negara (State Administration Council/SAC). Keterlibatan ini tidak hanya berdampak pada sektor militer, tetapi juga memperlambat proses demokratisasi dan memperkuat struktur oligarki. Hubungan erat kedua negara membuka peluang bagi Rusia di sektor energi dan teknologi nuklir.

**Kata Kunci:** Rusia, Myanmar, alutsista, hubungan internasional, kudeta.

### PENDAHULUAN

Salah satu jenis penelitian yang dikenal sebagai "hubungan internasional" mempelajari masalah antara dua negara atau lebih. Pada awalnya, penelitian ini hanya berfokus pada kompetisi daripada kolaborasi, terutama selama Perang Dunia I dan II. Namun, seiring berjalannya waktu dan dampak globalisasi yang meningkatkan rasa ketergantungan (interdependensi) antar negara, kerja sama mulai muncul di berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang pasokan. Rusia bergabung dengan Blok Allies saat Perang Dunia Kedua dan mengalahkan Blok Axis pada 2 September 1945. Menjadikan negara itu salah satu pemenang. Oleh karena itu, ia sekarang menjadi salah satu dari lima negara anggota tetap DK PBB yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dinamika hubungan internasional tidak terlepas dari kepentingan strategis negara-negara besar dalam memanfaatkan kekacauan di negara lain sebagai peluang geopolitik. Dalam konteks kudeta militer Myanmar tahun 2021–2022, Rusia muncul sebagai salah satu aktor utama yang memberikan dukungan militer dan diplomatik kepada rezim junta, di

tengah kecaman internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Rusia secara aktif memasok alutsista kepada Myanmar melalui perusahaan milik negara seperti Rosoboronexport. Pada saat bersamaan, Rusia juga menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk menolak sanksi terhadap junta Myanmar. Fenomena ini menunjukkan adanya ambiguitas antara prinsip non-intervensi yang diklaim oleh Rusia dengan tindakan nyata di lapangan.

## **KERANGKA TEORITIS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Neorealisme yang menekankan struktur sistem internasional sebagai penentu utama perilaku negara. Kenneth Waltz menyatakan bahwa negara bertindak untuk mempertahankan keamanan dan memaksimalkan kapabilitas dalam sistem yang anarkis. Selain itu, digunakan pula teori Kepentingan Nasional Donald E. Nuechterlein yang membagi kepentingan negara ke dalam empat kategori: pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi. Empat dimensi ini digunakan untuk mengkaji mengapa Rusia tetap mendukung Myanmar secara militer meskipun secara resmi menyerukan prinsip non-intervensi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-eksplanatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi dari berbagai laporan resmi, artikel jurnal internasional, pernyataan pemerintah, hingga laporan hak asasi manusia PBB. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan verifikasi menggunakan triangulasi sumber. Validitas data diperkuat melalui bahan referensi silang dan member check dari narasumber ahli di bidang hubungan internasional.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia secara strategis memanfaatkan situasi krisis internal di Myanmar pasca kudeta militer 2021-2022 untuk memperluas kepentingan nasionalnya di kawasan Asia Tenggara. Melalui pemasokan alat utama sistem senjata (alutsista) dan dukungan politik kepada Dewan Administrasi Negara (SAC), Rusia berhasil memperkuat posisi Myanmar di tengah tekanan internasional serta melindungi negara tersebut dari sanksi melalui hak veto di Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Rusia juga mempererat kerja sama ekonomi dengan Myanmar melalui ekspor minyak mentah dan promosi sistem pembayaran Mir, sekaligus menyeimbangkan pengaruh China dan membendung keterlibatan langsung negara-negara Barat. Keterlibatan Rusia tidak hanya berdampak pada aspek militer, tetapi juga memperlambat proses demokratisasi dan memperkuat oligarki di Myanmar.

### **1. Profil Umum Rusia**

Rusia, dengan luas wilayah  $\pm 17.098.242 \text{ km}^2$  dan letak astronomis  $60.00^\circ \text{LU} - 100.00^\circ \text{BT}$ , merupakan negara terluas di dunia yang secara geostrategis menempati posisi

kunci. Berdasarkan teori "The Geographical Pivot of History" dari Halford Mackinder, wilayah Rusia mencakup Heartland—pusat kekuasaan global yang menguasai sumber daya alam dan menghubungkan Eurasia. Posisi ini memperkuat kapabilitas pertahanan Rusia sekaligus memfasilitasi ekspor alutsista ke negara seperti Myanmar. Federasi Rusia telah lama dikenal sebagai penantang dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat. Peran global Rusia diperkuat oleh kepemimpinan Vladimir Putin serta kekuatan ekonominya yang menempati posisi keenam dunia dengan PDB \$4.078 miliar (2021). Selain kekuatan ekonomi, kekuatan militer Rusia yang diperkuat oleh industri pertahanannya menjadi sumber devisa penting, terutama melalui ekspor persenjataan. Produksi industri yang tumbuh 4,9% pada 2021 menandakan kontribusi sektor pertahanan terhadap ekonomi.

Meski stabilitas Myanmar menurun, kehadiran Rusia memberikan dampak ekonomi seperti peningkatan PDB Myanmar dari -17,9% (2021) menjadi 2,0% (2022). Myanmar juga memiliki potensi sumber daya uranium, yang menarik perhatian Rusia untuk kerja sama di sektor energi nuklir. Hal ini diwujudkan dalam "Roadmap for Further Atomic Energy Cooperation" pada 2022. Rusia pun terlibat dalam peningkatan penerimaan publik terhadap energi nuklir melalui pelatihan dan pembangunan pusat informasi.

Kebijakan luar negeri Rusia menekankan non-intervensi, sesuai Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia (Pasal 6 dan 18). Namun, dalam praktiknya, Rusia menunjukkan kontradiksi, terutama melalui pernyataan duta besarnya yang menyebut konflik Myanmar sebagai urusan domestik, sementara pada saat yang sama tetap memberikan dukungan diplomatik dan militer terhadap junta. Dukungan militer Rusia semakin nyata dengan kunjungan pejabat tinggi seperti Alexander Fomin ke Myanmar pada Maret 2021 dan Sergey Shoigu pada Januari 2021. Pengiriman alutsista seperti Pantsir S-1, drone Orlan-10E, MiG-29, Yak-130, dan Mi-35 memperkuat kekuatan junta. Keikutsertaan Myanmar dalam ARMY-2021 dan pelatihan bersama menunjukkan keterlibatan intensif Rusia.

Dampaknya terlihat dari meningkatnya serangan udara menggunakan pesawat buatan Rusia, terutama di wilayah Sagaing dan Kachin. Persentase serangan udara mencapai 43% dan 16,3% di wilayah tersebut. Selain itu, Myanmar telah menjadi salah satu pembeli utama senjata Rusia, memperlihatkan bagaimana Rusia melihat situasi Myanmar sebagai peluang strategis memperluas pengaruh.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional Rusia di Myanmar telah meluas dari sektor militer ke ekonomi, energi, dan ideologi. Walaupun tidak selalu sejalan dengan retorika kebijakan luar negerinya, strategi Rusia di Myanmar mencerminkan realitas sistem internasional yang kompetitif dan multipolar.

## **2. Profil Umum Myanmar**

Hubungan Rusia dan Myanmar semakin menguat sejak tahun 2014, khususnya melalui figur Jenderal Min Aung Hlaing yang menjadi pemimpin kudeta sekaligus kepala negara "de facto." Hubungan ini mencapai intensitas tinggi pada 2022, ditandai dengan peningkatan kunjungan bilateral dan kerja sama militer, termasuk pelatihan pascasarjana untuk perwira Angkatan Udara Myanmar di Rusia. Ketergantungan Myanmar terhadap Rusia semakin dalam, ditunjukkan melalui diversifikasi sumber pengadaan alutsista dari yang sebelumnya didominasi Tiongkok menjadi bergantung pula pada Rusia.

Rusia memanfaatkan hubungan ini untuk menegaskan pengaruh globalnya.

Myanmar mendapat manfaat dari sokongan diplomatik Rusia yang memperluas akses junta ke komunitas internasional. Selain itu, eskalasi konflik dengan kelompok bersenjata etnis seperti Kachin dan Karen, yang tergabung dalam Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), membuat Myanmar semakin mengandalkan teknologi militer dari Rusia. Dalam konteks isolasi internasional, hubungan erat antara Rusia, Myanmar, China, dan Korea Utara membentuk poros yang menentang dominasi Barat. Sanksi dari negara Barat terhadap Myanmar dan Rusia mendorong keduanya untuk saling menguatkan. Dukungan Rusia terhadap pembangunan militer Myanmar menghambat upaya ASEAN, terutama sejak diterapkannya konsensus lima poin pada April 2021. Pengeluaran militer Rusia yang meningkat drastis pada 2022 hingga lebih dari 7 triliun rubel menandakan komitmennya dalam mempertahankan pengaruh global, meskipun kondisi ekonomi global memburuk akibat perang Ukraina.

Myanmar menjadi pangsa baru bagi ekspor energi Rusia, khususnya di bidang nuklir. Keputusan pasokan energi Rusia ke Eropa memberi peluang ekspansi ke Asia Tenggara, termasuk Myanmar. Kondisi ini memperkuat hubungan strategis Rusia-Myanmar setelah kudeta militer 1 Februari 2021. Sebelum kudeta, Rusia hanya fokus pada pelatihan militer Myanmar, namun kini menjadi pemasok utama alutsista dan pelatih tempur. Sejarah panjang kekuasaan militer di Myanmar, mulai dari kudeta Ne Win (1958–1962), Perang 8888, hingga Konstitusi 2008, menunjukkan pola dominasi militer yang sulit digoyahkan. Meskipun NLD menang pemilu pada 2015 dan 2020, tekanan terhadap militer terus meningkat. Kekhawatiran akan pelemahan pengaruh politik mendorong militer melakukan kudeta pada 2021 dengan dalih kecurangan pemilu.

Setelah kudeta, Min Aung Hlaing membentuk State Administration Council (SAC), yang ditolak masyarakat. Konflik pun berkembang menjadi gerakan bersenjata. Pemerintah alternatif, National Unity Government (NUG), dipimpin tokoh-tokoh seperti Duwa Lashi La dan Aung San Suu Kyi, mengklaim legitimasi atas pemerintahan. PBB mengakui kemenangan NLD dalam pemilu 2020, memperkuat posisi NUG. Menurut Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB, Myanmar membutuhkan legitimasi, senjata, dan dukungan finansial. Rusia, dengan menyuplai alutsista dan mendukung SAC, melemahkan efektivitas embargo internasional. Hubungan ini menciptakan kompleksitas dalam penyelesaian krisis, karena keterlibatan aktor eksternal dengan kepentingan strategis masing-masing memperpanjang konflik dan ketegangan di kawasan.

## **B. Pembahasan: Kepentingan Nasional Rusia dalam Dukungan Terhadap Myanmar dalam Konflik Tahun 2021-2022**

### **1. Kepentingan Pertahanan**

Hubungan antara Rusia dan Myanmar, terutama melalui figur Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin kudeta dan kepala negara de facto, semakin erat sejak 2014 dan mencapai intensitas tertinggi pada 2022. Fokus utama hubungan ini terletak pada kerja sama militer, seperti pelatihan pascasarjana bagi perwira Myanmar, serta peningkatan ketergantungan Myanmar terhadap suplai senjata dari Rusia, yang sebelumnya didominasi oleh Tiongkok.

Bagi Rusia, kerja sama ini memperkuat pengaruh global dan memberikan akses diplomatik bagi Myanmar yang tengah diisolasi secara internasional. Ketergantungan

Myanmar semakin kuat akibat meningkatnya konflik dengan kelompok bersenjata seperti Kachin dan Karen (PDF), yang mendorong junta mengandalkan teknologi dan alutsista Rusia. Hubungan Rusia dan Myanmar diperkuat oleh keterlibatan negara-negara seperti China dan Korea Utara, membentuk poros yang menentang dominasi negara Barat. Sanksi dari Barat justru mempererat kerja sama ini. Rusia juga menghambat konsensus lima poin ASEAN, yang sejak 2021 berupaya menekan junta. Di sisi lain, Rusia meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan, bahkan ketika ekonomi global terpukul akibat perang di Ukraina.

Myanmar menjadi target baru ekspansi energi Rusia, khususnya energi nuklir, setelah pemutusan pasokan ke Eropa. Kudeta 2021 memperluas cakupan kepentingan Rusia di Myanmar, dari pelatihan militer menjadi penyedia utama senjata dan pelatihan tempur. Sejarah kekuasaan militer Myanmar—dari Ne Win, Perang 8888, hingga Konstitusi 2008—menunjukkan bahwa dominasi militer telah lama tertanam. Kemenangan NLD dalam pemilu 2015 dan 2020 tidak menghapus dominasi ini, dan kekhawatiran militer terhadap berkurangnya kekuasaan mendorong kudeta pada 2021. Min Aung Hlaing kemudian membentuk State Administration Council (SAC), yang ditolak luas oleh masyarakat dan melahirkan perlawanan bersenjata. National Unity Government (NUG), yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Duwa Lashi La dan Aung San Suu Kyi, mengklaim legitimasi berdasarkan hasil pemilu 2020 yang diakui PBB. Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB, menyatakan bahwa Myanmar membutuhkan legitimasi, senjata, dan dana untuk melawan rezim militer. Rusia, dengan dukungannya terhadap SAC melalui suplai senjata dan kerja sama energi, memperpanjang konflik dan menghambat resolusi internasional, sekaligus memperkuat pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik dengan menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat dan Uni Eropa.

## **2. Kepentingan Ekonomi**

Pengembangan Kepentingan ekonomi suatu negara mencakup upaya peningkatan nilai ekonomi melalui hubungan internasional. Dalam konteks ini, sektor ekonomi dan militer Rusia di Myanmar saling terkait erat. Pemasokan senjata menjadi pintu masuk Rusia untuk memperoleh keuntungan ekonomi, khususnya selama ketidakstabilan akibat pandemi dan sanksi internasional akibat Perang Rusia-Ukraina.

Rusia, melalui Rostec dan Rosneft, menjadi pemasok utama alutsista dan bahan bakar ke Myanmar. Dari Februari 2021 hingga Desember 2022, Rusia memperoleh keuntungan senjata sebesar USD 405 juta, dua kali lipat dari China, dan menyumbang sekitar 10% dari PDB Rusia selama periode tersebut. Myanmar menjadi pasar penting dalam strategi pemulihan ekonomi Rusia.

Selain penjualan, Rusia juga membeli kembali komponen militer buatan Myanmar untuk memperkuat kekuatan tempur mereka di Ukraina. Myanmar, yang kekurangan teknologi pengolahan sumber daya alam, memberikan peluang bagi Rusia untuk mengeksport minyak mentah melalui jalur baru ke pasar Asia, termasuk China dan India. Meskipun Myanmar bukan pengimpor terbesar, posisinya strategis bagi distribusi energi Rusia di Asia Tenggara.

Rusia juga memanfaatkan situasi ini untuk mempromosikan sistem pembayaran alternatif, Mir, sebagai pengganti SWIFT setelah dikeluarkan dari sistem tersebut pada

2022. Upaya ini dilakukan dengan mendorong kerja sama keuangan bilateral dengan Myanmar, meskipun implementasinya terbatas karena rendahnya nilai tukar Rubel dibanding Yuan. Secara keseluruhan, meskipun Rusia aktif memperluas pengaruh ekonomi di Myanmar, dominasi ekonomi China tetap lebih besar dalam perdagangan dan sistem keuangan di negara tersebut.

### **3. Kepentingan Tata Internasional**

Kepentingan tata internasional mencerminkan upaya suatu negara dalam mempertahankan eksistensi, stabilitas, dan pengaruhnya di panggung global. Bagi Rusia, hal ini tercermin dalam langkah strategis mempererat hubungan dengan Myanmar untuk menjamin kelangsungan kekuasaan nasional di tengah tekanan internasional. Hubungan kedua negara semakin intensif sejak kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 dan invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Myanmar menjadi satu-satunya negara ASEAN yang secara terbuka mendukung langkah Rusia di Ukraina, sementara Rusia membalasnya dengan mengakui legitimasi pemerintahan junta Myanmar dan memberikan perlindungan politik di forum-forum internasional melalui kekuatan veto di Dewan Keamanan PBB.

Kedekatan strategis ini memberikan keuntungan timbal balik. Bagi Rusia, Myanmar menjadi basis penting untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Dukungan Rusia tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga menyentuh dimensi teknologi strategis, termasuk transfer teknologi nuklir melalui ROSATOM. Kolaborasi ini memungkinkan peningkatan kapabilitas teknis Myanmar di bidang nuklir untuk keperluan sipil, namun secara jangka panjang juga membuka kemungkinan penggunaan militer. Dengan tidak meratifikasi NPT dan TPNW, Rusia menunjukkan fleksibilitas dalam mendukung negara mitra seperti Myanmar, yang memiliki potensi strategis di kawasan.

Di sisi lain, hubungan erat ini juga memperkuat posisi junta Myanmar secara internasional. Rusia menjadi pelindung utama yang memungkinkan Myanmar bertahan dari isolasi diplomatik akibat kecaman global. Selain Rusia, Myanmar juga memperoleh dukungan dari negara-negara seperti China, India, Pakistan, Bangladesh, Viet Nam, dan Laos, serta organisasi internasional lainnya. Namun, pengaruh Rusia lebih menonjol karena intensitas kunjungan bilateral dan kerja sama militer yang lebih terbuka dibandingkan dengan China, yang lebih berhati-hati dan menjaga jarak politik.

Kepentingan ideologi turut menjadi landasan hubungan Rusia–Myanmar. Dengan latar belakang otoritarianisme dan pengalaman sebagai negara komunis, Rusia mendukung kelangsungan sistem politik non-demokratis sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi nilai-nilai liberal Barat. Dukungan terhadap Myanmar menjadi bagian dari strategi global Rusia untuk membentuk blok kekuatan yang tidak tunduk pada tekanan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Myanmar juga difasilitasi menjadi dialogue partner dalam organisasi seperti Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan BRICS, memperluas pilihan diplomatik di luar ASEAN yang cenderung bersikap kritis terhadap junta.

Strategi Rusia di Myanmar juga tidak lepas dari tujuan untuk menyeimbangkan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik dan memproyeksikan kekuatan ke wilayah Far Eastern Rusia. Dengan mengonsolidasikan kekuatan di Asia Tenggara, Rusia mencoba menegaskan

posisinya sebagai kekuatan besar dunia yang mampu menandingi pengaruh Barat, baik secara militer, ekonomi, maupun ideologis. Meskipun secara tersurat Rusia tidak menyatakan keinginannya untuk menghambat demokratisasi di Myanmar, tindakan-tindakannya melalui pasokan senjata dan dukungan diplomatik jelas mengarah pada pelestarian status quo yang otoriter.

Secara keseluruhan, hubungan Rusia–Myanmar mencerminkan pendekatan strategis Rusia dalam menggunakan mitra-mitra otoriter untuk memperkuat posisi geopolitiknya. Myanmar menjadi contoh nyata bagaimana kepentingan tata internasional dan ideologi dipadukan dalam diplomasi luar negeri Rusia. Keberlanjutan hubungan ini memungkinkan Rusia mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia, sambil memperluas jaringan aliansi global di luar orbit kekuatan Barat.

## **KESIMPULAN**

Rusia secara strategis memanfaatkan konflik internal Myanmar untuk mencapai berbagai kepentingan nasionalnya, baik di bidang militer, ekonomi, geopolitik, maupun ideologi. Dukungan ini menegaskan bahwa kepentingan nasional lebih diutamakan daripada retorika normatif seperti prinsip non-intervensi. Dalam konteks neorealisme, tindakan Rusia adalah cerminan dari kebutuhan untuk mempertahankan posisi dalam sistem internasional yang kompetitif dan tidak stabil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan realis dapat menjelaskan konsistensi perilaku negara besar seperti Rusia dalam merespons krisis internasional, dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas prinsip etis universal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

ABC News In-Depth. (2023, March 13). Myanmar's forgotten war explained: The military coup, revolution, NUG, Rohingya [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=StDA-aki1gk>

Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN-Burma). (2023, June 15). Coup watch May 2023: Cyclone Mocha: Illegal junta obstructs humanitarian aid. <https://drive.google.com/file/d/1IBO7jKmBCLxRkQ5j-9KnK5NUmU3kj96y/view>

ALTSEAN-Burma. (2023, May). *Coup Watch Mei 2023: Cyclone Mocha: Illegal junta obstructs humanitarian aid.* Coup Watch Briefers. <https://drive.google.com/file/d/1IBO7jKmBCLxRkQ5j-9KnK5NUmU3kj96y/view>

- Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). (2022, December 30). Daily briefing in relation to the military coup. <https://aappb.org/?p=23818>
- Auras, L. L. (2015). *Russia and Myanmar—Friends in Need? Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 34(2), 165–198.
- Central Intelligence Agency. (n.d.). Explore all countries—Burma. The World Factbook. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/burma/>
- Centre for Information Resilience. (2023, January 27). Eyes on the skies: The dangerous and sustained impact of airstrikes on daily life in Myanmar. Myanmar Witness. <https://www.myanmarwitness.org/reports/eyes-on-the-skies>
- Cheang, C. (2021). *Russia and Myanmar: Moscow's expanding influence?* S. Rajaratnam School of International Studies.
- Cheang, C. (n.d.). Life and work in post-Soviet Russia (p. 105).
- Chufrin, G., & Hong, M. (2007). *Russia-ASEAN relations: New directions*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Codification Division Publications. (2021). *Charter of United Nations*. Repertory of Practice of United Nations Organs. <https://legal.un.org/repertory/art1.shtml>
- Constitute Project Organization. (n.d.). *Myanmar's Constitution 2008*. Repository of the Comparative Constitution Project. [https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar\\_2008.pdf?lang-en](https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf?lang-en)
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd ed., p. 38).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2007). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed., pp. 38–39).

Daily Briefing Since Coup. (2023, April 28). *Daily briefing in relation to the military coup.*

Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). <https://aappb.org/?p=24821>

Defense Mirror. (2021, August 25). Russia signs 2 billion euro worth contracts with foreign customers at ARMY-2021.

[https://www.defensemirror.com/news/30300/Russia\\_Signs\\_2\\_Billion\\_Euro\\_worth\\_Contracts\\_with\\_Foreign\\_Customers\\_at\\_ARMY\\_2021](https://www.defensemirror.com/news/30300/Russia_Signs_2_Billion_Euro_worth_Contracts_with_Foreign_Customers_at_ARMY_2021)

East Asia Forum. (2022, November 5). *Russian arms and influence in Myanmar*. Economics, Politics, and Public Policy in East Asia and the Pacific.

<https://www.eastasiaforum.org/2022/11/05/russian-arms-and-influence-in-myanmar>

East Asia Forum. (2022, November 5). Russian arms and influence in Myanmar.

<https://www.eastasiaforum.org/2022/11/05/russian-arms-and-influence-in-myanmar/>

Ensiklopedia Holocaust. (n.d.). *Blok Poros dalam Perang Dunia II*. United States Holocaust Memorial Museum. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/axis-powers-in-world-war-ii>